

Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia

Gris Sintya Berlian

Abstract

The main objective of this research is to explore the politics of downstream palm oil industry in Indonesia which focuses on analyzing domestic factors. Those factors hold an important role in influencing the development that is considered not optimal. Methodologically, this research is using qualitative data analysis technique through data collected from literature study and doing interviews with government officials and association in related industry for about six months. The result of this study based on institutionalist political economy perspective indicates that incapability of the government as entrepreneur and manager of conflicts causes the development of Indonesian palm oil. As an entrepreneur, government incapability can be seen from the vision of palm oil industry which is unclear. Besides, there is no synergy between government and related agents in choosing instrument for the development of the industry. As a manager of conflicts, government incapability can be seen from its unclear solution for different perspective during development of downstream palm oil industry in Indonesia.

Keywords: *Downstream palm oil industry, PPO, Indonesia, government, entrepreneur, manager of conflicts, policy*

Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan produk industri kelapa sawit yang paling banyak diekspor dari tahun 2007 hingga 2011 dengan rata - rata ekspor senilai 8,33 milyar dolar atau setara dengan 52,2 % dari total ekspor produk kelapa sawit. Meskipun kontribusi ekspor CPO sebagai hasil produk industri hulu besar dan bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia tidak berpuas diri²⁸. Indonesia membuat program hilirisasi kelapa sawit untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit sehingga memiliki nilai tambah lebih dengan mengolah lebih lanjut CPO menjadi produk setengah jadi maupun jadi sehingga nilai tambah produk

²⁸ Esti.2014.http://www.tambang.co.id/detail_berita.php?category=18&newsnr=8865, akses 3 September 2014

kelapa sawit dapat ditingkatkan. Produk setengah jadi dihasilkan oleh industri hilir dalam bentuk oleo-pangan²⁹ seperti mentega, minyak goreng dan oleo-kimia³⁰ seperti *fatty acid*, *fatty alcohol*, dll. Sedangkan produk jadi dihasilkan oleh industri hilir yang bergerak di bidang seperti olahan makanan, kosmetik, farmasi, dan pabrik logam.

Penerapan hilirisasi kelapa sawit menunjukkan perubahan positif bagi Indonesia. Jika pada tahun 2011 komposisi ekspor CPO terhadap produk turunan CPO sebesar 60:40, pada tahun 2013 komposisi tersebut berubah menjadi 40:60³¹. Selain dilihat dari komposisi ekspor, penerapan hilirisasi juga berdampak positif pada diversifikasi produk. Jika pada tahun 2011 jumlah produk turunan CPO yang dihasilkan oleh Indonesia sebanyak 54 jenis, pada tahun 2014 jumlahnya bertambah menjadi sebanyak 169 jenis.

Meskipun sudah terjadi perubahan komposisi ekspor, perkembangan hilirisasi kelapa sawit Indonesia tidak secepat yang diharapkan karena belum dapat mengambil alih posisi Malaysia sebagai negara pengekspor produk turunan terbesar di dunia³². Hal ini terlihat dari masih lebih rendahnya produktivitas industri hilir kelapa sawit di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki komposisi ekspor 20:80. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi kelapa sawit Indonesia belum optimal.

Studi literatur yang ada menunjukkan belum ada yang membahas sisi politik hilirisasi kelapa sawit. Salah satu studi literatur yang membahas tentang pembangunan industri kelapa sawit adalah tulisan Rajah Rasiah dan Azmi Shahrin Rasiah³³ yang berjudul "*Development of Palm Oil and Related Products in*

²⁹ Oleo-pangan adalah penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk pangan.

³⁰ Oleo-kimia adalah penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk kimia (non-pangan).

³¹ Sahat Sinaga, <http://www.agrofarm.co.id/m/sawit/940/sahat-sinaga-direktur-eksekutif-gimni-harga-sawit-setara-soft-oil-kampanye-negatif-hilang/#.VlpKzDGUfcA>, akses 12 Desember 2014

³² W.Sutopo et al, http://ormawa.ft.uns.ac.id/repo/data/6/SCM/Kuliah%20SCM/Paper%20PIC%203%20SCM%20for%20Palm%20Oil/Paper%20PIC%203%20SCM%20for%20Palm%20Oil/IJLSM_Fnl_REV_1_04_02_14.pdf, akses 4 September 2014

³³ http://www.researchgate.net/profile/Rajah_Rasiah/publication/237474157_Development_of_Palm_Oil_and_Related_Products_in_Malaysia_and_Indonesia/links/02e7e52670ab3124ca000000, akses 28 Agustus 2014

Malaysia and Indonesia”. Tulisan ini melihat aspek pembangunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia berdasarkan peran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut serta institusi yang diciptakan dapat mempengaruhi perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan kebijakan dan institusi yang digunakan untuk mendukung industri kelapa sawit di Indonesia masih terfragmentasi, lemah, dan belum efektif untuk merepresentasikan industri kelapa sawit. Pemerintah berorientasi pada kebijakan substitusi impor untuk menjaga agar harga minyak goreng stabil. Selain itu, beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah malah menjadi penghalang bagi pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia³⁴.

Karena belum ada yang membahas pembangunan industri kelapa sawit dari segi hilirisasi dengan menggunakan sudut pandang politik maka tulisan ini pun dibuat. Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah apa faktor domestik yang menyebabkan perkembangan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia belum optimal. Untuk menjawab faktor penyebab domestik bagi perkembangan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia yang belum optimal maka digunakan perspektif ekonomi politik institusionalis dengan melihat peran negara sebagai *entrepreneur* dan *manager of conflicts* dalam memfasilitasi perubahan struktural melalui hilirisasi.

Agar hilirisasi kelapa sawit dari sisi politik dapat dipahami maka tulisan terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama berisi momentum hilirisasi kelapa sawit Indonesia. Bagian kedua berisi tentang tantangan domestik dengan menganalisis peran pemerintah dari sisi ketidakmampuan pemerintah sebagai *entrepreneur* dan *manager of conflicts* dalam hilirisasi kelapa sawit. Bagian terakhir berisi kesimpulan dalam tulisan ini.

³⁴ Rajah dan Azmi Shahrin, http://www.researchgate.net/profile/Rajah_Rasiah/publication/237474157_Development_of_Palm_Oil_and_Related_Products_in_Malaysia_and_Indonesia/links/02e7e52670ab3124ca000000, akses 28 Agustus 2014

Momentum Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia

Wacana hilirisasi kelapa sawit di Indonesia muncul pada tahun 2010. Wacana ini muncul seiring dengan adanya keinginan untuk meningkatkan nilai tambah domestik atas produk industri kelapa sawit. Tindak lanjut dari wacana hilirisasi tersebut adalah perubahan struktur BK yang ditandai dengan dikeluarkannya PMK³⁵ No. 128 tahun 2011 dan menggantikan PMK No. 67 tahun 2010. Jika PMK No. 67 tahun 2010 menerapkan Bea Keluar (BK³⁶) yang sama bagi produk industri hulu dan hilir dengan besar yang sama maka PMK No. 128 tahun 2011 mengenakan BK yang lebih tinggi bagi produk hulu dibandingkan produk hilir. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan insentif kepada industri hilir. Perubahan struktur BK melalui PMK No.128 tahun 2011 inilah yang menjadi momentum hilirisasi kelapa sawit di Indonesia dan dijadikan sebagai “*prime mover*” bagi kebangkitan industri hilir kelapa sawit (IHKS³⁷) Indonesia.³⁸

Tantangan Domestik: Keterbatasan Peran Pemerintah Indonesia dalam Hilirisasi Kelapa Sawit

Hilirisasi merupakan upaya perubahan struktural yang dilakukan oleh Indonesia agar dapat mengubah kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional sebagai pengekspor CPO menjadi modern dengan menjadi pengekspor produk turunan CPO. Berhasil tidaknya perubahan struktural ini bergantung pada peran pemerintah dalam memfasilitasi perubahan struktural yang ada (Hha-Joon Chang, 2003:21). Dalam memfasilitasi perubahan struktural melalui hilirisasi, ada dua peran yang dimiliki oleh pemerintah. Peran tersebut adalah *state as entrepreneur* dan *state as manager of conflicts*.

Ketika pemerintah belum mampu berperan sebagai *entrepreneur* dan *manager of conflicts* maka perubahan struktural yang efektif belum dapat terjadi. Hal inilah yang terjadi dengan hilirisasi kelapa sawit Indonesia. Pemerintah belum

³⁵ Merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Keuangan.

³⁶ Selanjutnya ditulis dengan BK.

³⁷ Selanjutnya ditulis dengan IHKS.

³⁸ Hasil wawancara dari berbagai narasumber.

mampu memenuhi perannya sebagai *entrepreneur* dan *manager of conflicts*. Ketidakmampuan memenuhi perannya ini berdampak pada perkembangan hilirisasi kelapa sawit yang belum optimal. Untuk membahas hal tersebut, tulisan selanjutnya berisi tentang ketidakmampuan pemerintah berperan sebagai *entrepreneur* dan *manager of conflicts*.

Ketidakmampuan Pemerintah Indonesia sebagai Entrepreneur

Karakter *entrepreneurship* secara umum dibutuhkan oleh *entrepreneur* agar dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mendirikan bisnis baru sesuai dengan kesempatan yang ada. Pada level negara, karakter *entrepreneurship* juga dibutuhkan oleh pemerintah jika ingin melakukan perubahan struktural melalui hilirisasi kelapa sawit. Karakter tersebut menjadi penting karena pemerintah sebagai agen pusat memiliki peran untuk melakukan koordinasi agar perubahan struktural melalui hilirisasi dapat efektif.

Koordinasi oleh pemerintah perlu dilakukan dengan mengingat bahwa industri hilir kelapa sawit industri bersifat interdependen dan kepemilikannya yang tersebar. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah berfungsi agar industri kelapa sawit mulai dari hulu hingga hilir memahami peran masing - masing untuk mewujudkan hilirisasi. Jika perubahan hanya dilakukan oleh agen individu tanpa adanya koordinasi dari pusat maka hilirisasi tidak efektif. Tidak hanya itu, hal tersebut justru dapat menimbulkan penderitaan bagi suatu pihak sebagai akibat dari ketidakpastian tindakan yang dilakukan oleh pihak lain (Hha-Joon, 2003: 52). Hal inilah yang terjadi dalam hilirisasi kelapa sawit Indonesia.

Ada dua hal yang dapat digunakan untuk melihat ketidakmampuan pemerintah berperan sebagai *entrepreneur* dalam hilirisasi kelapa sawit Indonesia sehingga perkembangannya belum optimal. Hal tersebut adalah ketidakjelasan visi industri kelapa sawit dan ketidaksinergian pemerintah dengan pelaku industri kelapa sawit. Indonesia hanya memiliki visi tidak tertulis untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian domestik melalui industri kelapa sawit. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia menggunakan BK sebagai instrumennya. Pada kenyataannya, BK tersebut tidak hanya berlaku bagi industri kelapa sawit. Tapi, juga berlaku bagi industri lain seperti kakao dan mineral dengan waktu yang

relatif tidak jauh berbeda.³⁹ Selain itu, apabila melihat pada lingkup yang lebih luas dengan tidak hanya melihat pada penerapan BK terhadap produk tertentu maka pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menetapkan industri prioritas yang terdiri atas 35 klaster⁴⁰.

Banyaknya industri yang menjadi prioritas membuat perhatian pemerintah untuk mengembangkan industri menjadi tersebar. Dampaknya adalah pemerintah belum mampu mengambil tindakan untuk benar-benar fokus pada suatu industri agar dapat dikembangkan terlebih dahulu secara optimal. Belum fokusnya pemerintah dalam mengembangkan industri kelapa sawit terlihat dari belum adanya *blueprint*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Enny Sri Hartati yang menjabat sebagai Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Beliau mengatakan bahwa keinginan pemerintah untuk membangun industri hilir kelapa sawit tidak dibarengi dengan penciptaan integrasi industri hulu dan hilir⁴¹. Hal ini terlihat dari tidak adanya profil industri dan *blueprint* operasional yang menjadi peta arah bagi pemangku kebijakan yang terkait dengan industri kelapa sawit. Kalau saja potensi industri kelapa sawit sudah dapat dirumuskan sebagai industri yang bernilai strategis dan bernilai tambah maka dapat dipastikan jika industri kelapa sawit Indonesia berkembang pesat khususnya di kawasan Asia.

Dilandaskan pada penjelasan yang ada di atas dapat dikatakan bahwa keinginan pemerintah untuk mengembangkan industri kelapa sawit melalui hilirisasi tidak diiringi dengan upaya pemerintah secara sepenuhnya untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan teori tentang *state as entrepreneur*, pemerintah memiliki peran untuk menetapkan visi sebagai landasan agar perubahan struktural dapat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa visi merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu negara sebagai petunjuk bagi

³⁹Hilirisasi kakao melalui BK dimulai pada tahun 2010. Hilirisasi kelapa sawit melalui BK dimulai pada tahun 2011. Hilirisasi mineral melalui BK dimulai pada tahun 2012. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pernyataan tentang kurun waktu perubahan struktural yang relatif tidak jauh berbeda.

⁴⁰ Kemenperin. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19/Kebijakan-Industri-Nasional>, akses 24 Januari 2015)

⁴¹ Sawit Indonesia, <http://sawitindonesia.com/sajian-utama/dimana-peran-dan-keberpihakan-pemerintah-terhadap-sawit>, akses 9 Maret 2015)

arah perubahan struktural yang dilakukan. Pada kenyataannya, pemerintah Indonesia tidak memiliki visi yang jelas karena tidak memiliki *blueprint* sebagai landasan bagi rencana jangka pendek dan panjang yang ingin diwujudkan dalam mengembangkan industri kelapa sawit.

Karena tidak memiliki *blueprint* maka tidak mengherankan jika perkembangan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia belum optimal. Penyebabnya adalah perkembangan akibat hilirisasi memang terbukti positif jika dilihat dari sisi peningkatan investasi IHKS, peningkatan kapasitas produksi IHKS, peningkatan nilai tambah produk ekspor kelapa sawit, dan peningkatan nilai ekspor produk kelapa sawit (Berlian, tesis, 2015: 48). Lebih dari itu, pemerintah tidak mengetahui apa yang sesungguhnya ingin diwujudkan dalam jangka panjang dengan adanya dampak positif yang ditimbulkan oleh hilirisasi. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar bagi ketidakjelasan visi yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengembangkan industri kelapa sawit.

Dalam rangka mewujudkan hilirisasi, pemerintah tidak memiliki institusi khusus yang fokus pada hal tersebut. Keberadaan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) hanya merupakan rekan kerja dalam membuat kebijakan atau program terkait dengan kelapa sawit. Koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha terlihat dari keterlibatan GAPKI dalam pembuatan kebijakan untuk mengembangkan IHKS. Dalam keterlibatan tersebut, GAPKI mengusulkan bahwa selain menggunakan BK, seharusnya pemerintah juga membuat kebijakan lain tanpa membuat salah satu bagian dalam *supply chain* rugi (Responden 1, Wawancara Personal dengan GAPKI, 18 Desember 2014). Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi keseluruhan. Misalnya insentif dari segi perpajakan, R&D, teknologi, infrastruktur. Usul yang diajukan oleh GAPKI ini tidak diterima oleh pemerintah (Responden 1, Wawancara Personal dengan GAPKI, 18 Desember 2014). Pada kenyataannya, BK tetap merupakan kebijakan utama pemerintah untuk mengembangkan industri hilir.

Selain GAPKI, DMSI juga mengajukan usul bahwa seharusnya hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah berbasis inovasi (Responden 2, Wawancara Personal dengan DMSI, 17 November 2014). Pandangan ini bercermin pada

kesuksesan Malaysia dalam mengembangkan industri kelapa sawit. Salah satu hal paling penting yang sukses membuat Malaysia dinamis dalam mengembangkan produk turunan CPO adalah adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta terkait dengan R&D yang terus menerus dilakukan demi menciptakan produk turunan kelapa sawit yang tepat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dunia (Silsila, Tesis, 2011: 72). Koordinasi dan kolaborasi ini terlihat dari dukungan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB⁴²) dalam memfasilitasi pengusaha dengan adanya dana riset untuk melakukan kolaborasi penelitian bersama MPOB melalui kesepakatan royalti atau paten. Tidak hanya itu, MPOB juga mengizinkan penggunaan teknologi milik MPOB melalui lisensi (Silsila, Tesis, 2011: 72).

Hal yang berbeda terjadi pada Indonesia. Teknologi yang berkembang dalam industri kelapa sawit dimiliki secara privat oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit (Responden 3, Wawancara Personal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, 16 Desember 2014). Kontribusi paling besar pemerintah bagi penelitian dan teknologi transfer dalam industri kelapa sawit terbatas pada kemampuannya untuk dengan menyediakan tenaga kerja teknis dan ahli⁴³. Konsekuensi dari kondisi ini adalah hubungan antara penelitian publik milik pemerintah dengan penelitian privat milik swasta menjadi terbatas. Untuk mengembangkan penelitian, perusahaan yang ada di Indonesia lebih memilih untuk menggunakan institusi publik maupun privat ataupun perusahaan yang ada di luar Indonesia sebagai sumber inovasi dan perubahan dalam industri kelapa sawit⁴⁴

Perbedaan pandangan dalam menggunakan instrumen hilirisasi dari sisi pemerintah dan pengusaha menunjukkan bahwa pemerintah dan pengusaha tidak

⁴² Selanjutnya ditulis dengan MPOB.

⁴³ Rajah dan Azmi Shahrin, http://www.researchgate.net/profile/Rajah_Rasiah/publication/237474157Development_of_Palm_Oil_and_Related_Products_in_Malaysia_and_Indonesia/links/02e7e52670ab3124ca000000, akses 28 Agustus 2014

⁴⁴ Rajah dan Azmi Shahrin, http://www.researchgate.net/profile/Rajah_Rasiah/publication/237474157Development_of_Palm_Oil_and_Related_Products_in_Malaysia_and_Indonesia/links/02e7e52670ab3124ca000000, akses 28 Agustus 2014.

bersinergi. Pemerintah menggunakan BK sebagai instrumen hilirisasi. Sedangkan pelaku industri kelapa sawit menginginkan agar instrumen hilirisasi berupa pemberian insentif dan inovasi. Keinginan pelaku industri kelapa sawit yang belum dipenuhi oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah belum bersinergi dengan pelaku industri kelapa sawit. Penyebabnya adalah pemerintah belum mampu memfasilitasi perubahan struktural seperti yang diinginkan oleh pelaku industri kelapa sawit sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perubahan struktural. Ketidaksinergian inilah yang menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi peran sebagai *entrepreneur* sehingga membuat perkembangan hilirisasi kelapa sawit Indonesia belum optimal.

Perbedaan pandangan ternyata juga terjadi pada internal pemerintah. Hal tersebut terlihat dari koordinasi dalam formulasi BK dengan besaran yang setiap bulan berubah-ubah. Keberadaan koordinasi dalam formulasi kebijakan untuk mewujudkan hilirisasi kelapa sawit Indonesia juga menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai *entrepreneur*. Kementerian yang dilibatkan dalam koordinasi formulasi BK setidaknya terdiri atas Kementerian Pertanian (Kementan⁴⁵), Kementerian Perindustrian (Kemenperin⁴⁶), Kementerian Perdagangan (Kemendag⁴⁷), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu⁴⁸). Meskipun sama-sama mengarah pada peningkatan nilai tambah domestik, kementerian terkait yang dikoordinasikan dan dilibatkan dalam formulasi BK memiliki prioritas masing – masing. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu narasumber tentang adanya perbedaan pandangan sedikit – sedikit antarkementerian terkait dalam formulasi BK (Responden 4, Wawancara Personal dengan Kemenkeu, 6 Januari 2015). Penyebabnya adalah setiap kementerian memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) yang berfungsi untuk menilai kinerja masing – masing kementerian. Karena fokus pada pencapaian masing – masing maka dapat dikatakan bahwa pemerintah belum bersinergi dalam formulasi BK.

⁴⁵Selanjutnya ditulis dengan Kementan.

⁴⁶ Selanjutnya ditulis dengan Kemenperin.

⁴⁷ Selanjutnya ditulis dengan Kemendag.

⁴⁸ Selanjutnya ditulis dengan Kemenkeu.

Fokus pada pencapaian sesuai dengan fungsi dan peran masing – masing institusi terlihat dari besar kecilnya BK yang diinginkan. Kementan memiliki peran untuk melindungi kesejahteraan petani sebagai pemasok bahan baku industri kelapa sawit melalui TBS sehingga menginginkan BK yang tidak terlalu besar (Responden 4, Wawancara Personal dengan Kemenkeu, 6 Januari 2015). Kemendag memiliki peran untuk memelihara atau meningkatkan ekspor kelapa sawit sehingga menginginkan BK tidak terlalu besar. Kemenperin justru tidak fokus pada besar kecilnya BK (Responden 4, Wawancara Personal dengan Kemenkeu, 6 Januari 2015). Penyebabnya adalah Kemenperin memiliki visi tersendiri, yaitu mengembangkan industri hilir melalui klaster dengan menggunakan *tax allowance* dan *tax holiday* sebagai instrumennya (Responden 5, Wawancara Personal dengan Kemenperin, 22 Desember 2014). Kemenkeu fokus pada BK karena BK digunakan untuk mencapai tujuan utama agar pendapatan negara meningkat jika produk turunan CPO yang diekspor memiliki nilai tambah yang tinggi (Responden 4, Wawancara Personal dengan Kemenkeu, 6 Januari 2015).

Penjelasan yang ada di atas menunjukkan bahwa dalam formulasi BK, ketidaksinergian terjadi karena institusi pemerintah memiliki kepentingan masing – masing. Hal ini juga disampaikan oleh GAPKI yang menyatakan bahwa kepentingan ekonomi politik yang dimiliki oleh instansi pemerintah berbeda-beda karena disesuaikan dengan tujuan masing – masing instansi dalam sebuah instrumen hilirisasi yang bernama BK (Responden 1, Wawancara Personal dengan GAPKI, 18 Desember 2014). Dilandaskan pada penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perkembangan hilirisasi kelapa sawit yang belum optimal di Indonesia juga disebabkan oleh pemerintah yang tidak bersinergi dalam formulasi BK karena fokus pada kepentingan yang dimiliki oleh masing – masing institusi.

Ketidakkampuan Pemerintah Indonesia sebagai Manager of Conflicts

Peran yang dimiliki oleh pemerintah sebagai *manager of conflicts* menunjukkan bahwa pemerintah merupakan sumber solusi dalam mengatasi perbedaan pandangan yang ada di antara pihak yang terlibat dalam perubahan struktural. Perbedaan pandangan ini dapat muncul ketika koordinasi dan sinergi yang dilakukan melalui perubahan pola koordinasi yang baru belum diterima oleh semua pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan ketika pemilik faktor produksi merasa tidak puas dengan hasil yang diterima akibat adanya dislokasi faktor produksi selama perubahan struktural berlangsung. Hal inilah yang terjadi dalam hilirisasi kelapa sawit Indonesia.

Selama hilirisasi kelapa sawit terjadi di Indonesia setidaknya ada dua perbedaan pandangan yang muncul. Perbedaan tersebut terkait dengan kerugian petani kelapa sawit akibat perilaku pengusaha industri hilir dan ketidakjelasan pemanfaatan dan BK oleh pemerintah. Untuk mengatasi perbedaan pandangan ini, pada praktiknya pemerintah belum mampu menjadi sumber solusi. Ketidakkampuan negara dalam memberikan solusi atas kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menjadi *manager of conflicts*. Hal inilah yang membuat perkembangan hilirisasi kelapa sawit belum optimal di Indonesia. Untuk mengetahui secara lebih jelas, tulisan selanjutnya membahas tentang ketidakmampuan pemerintah sebagai *manager of conflicts* dalam isu kerugian petani kelapa sawit akibat perilaku pengusaha industri hilir dan ketidakjelasan pemanfaatan dan BK oleh pemerintah.

Selama hilirisasi petani merasa memperoleh disinsentif karena pajak yang dibayarkan oleh pelaku industri hilir melalui BK ditransformasikan kepada petani sebagai produsen CPO dengan harga jual Tandan Buah Segar (TBS⁴⁹) yang tidak selayaknya. Harga jual tidak selayaknya yang diterima oleh petani akibat *behavior* pengusaha industri hilir karena tidak menggunakan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Perdagangan, Teks Hasil Wawancara Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian

⁴⁹ Selanjutnya ditulis dengan TBS.

Perdagangan untuk Majalah InfoSawit dengan Tema BK CPO dan Produk Turunannya, 31 Desember 2014). Hal inilah yang akhirnya membuat petani mengalami kerugian.

Meskipun memilih fokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah domestik, bukan berarti bahwa pemerintah menjadi abai terhadap perbedaan pandangan antara petani dan pelaku industri hilir. Peran pemerintah sebagai *manager of conflicts* menjadi dibutuhkan. Hal tersebut diperlukan karena perubahan struktural baru dapat dikatakan berhasil apabila negara mampu menjamin semua anggota masyarakat dalam level pendapatannya diperlakukan secara adil. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang bernama Asmar Arsjad. Beliau menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah pada para petani kelapa sawit saat ini memang masih sangat minim⁵⁰. Kondisi tersebut membuat para petani kelapa sawit sulit berperan serta dalam mengembangkan industri kelapa sawit Indonesia.

Pengabaian memang benar adanya ketika salah satu narasumber penelitian yang berasal dari institusi pemerintah menyatakan bahwa selama hilirisasi kelapa sawit berlangsung belum terjadi perbedaan pandangan (Responden 6, Wawancara Personal dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian⁵¹, 19 Desember 2014). Selain itu, narasumber yang berasal dari institusi pemerintah lainnya juga mengatakan bahwa sepanjang pengetahuan yang dimiliki, belum ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kerugian yang diterima oleh petani kelapa sawit (Responden 7, Wawancara Personal dengan Kemendag, 31 Desember 2014).

Untuk memenuhi perannya sebagai *manager of conflicts* maka negara perlu menjamin agar semua anggota masyarakat diperlakukan secara adil dalam level pendapatannya. Hal ini khususnya terkait dengan implementasi penetapan harga TBS oleh pengusaha industri hilir agar sesuai dengan kebijakan harga TBS yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga tidak merugikan petani kelapa

⁵⁰ Riset Perkebunan Nusantara, <http://rpn.co.id/site/homes/artikel/111/Sebagian-Dana-Hasil-BK-CPO-untuk-Riset>, akses 21 Januari 2015

⁵¹ Selanjutnya ditulis dengan Kemenko.

sawit. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Responden 2 yang berasal dari DMSI (Wawancara Personal, 17 November 2014), yaitu:

“Sesungguhnya kebijakan hilirisasi yang dibuat oleh pemerintah sudah bagus. Hanya saja lemah pada implementasinya. Kebijakan hilirisasi kelapa sawit yang ada di Indonesia tidak dijalankan secara komprehensif di sepanjang rantai pasok. Dampak dari hal ini adalah sektor hulu masih menanggung beban. Beban tersebut muncul karena BK yang dibebankan kepada industri hilir malah menjadi beban sektor hulu.”

Selain menimbulkan kerugian bagi petani kelapa sawit, ketidakjelasan pemanfaatan dana BK juga layak menjadi perhatian. Sesuai dengan Undang - Undang tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan UU No.4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Bea Keluar merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional selain Bea Masuk (Kementerian Perdagangan, Teks Hasil Wawancara Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan untuk Majalah InfoSawit dengan Tema BK CPO dan Produk Turunannya, 31 Desember 2014). Dengan kata lain, hasil yang diperoleh dari penerapan BK menjadi pendapatan negara. Karena menjadi pendapatan negara maka menjadi wewenang negara untuk mengalokasikan dana yang dimiliki sesuai dengan pos – pos yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Responden 2 yang berasal dari DMSI dapat dikatakan bahwa pengusaha merasa jika kepentingannya belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh pemerintah melalui peruntukkan dana BK yang tidak jelas (Wawancara Personal, 17 November 2014).

Ketidakjelasan ini muncul karena sebagai bagian dari pendapatan negara dan digabung menjadi satu dengan pendapatan negara yang berasal dari sumber lain maka dampaknya adalah pemanfaatan dana BK untuk pengeluaran pemerintah melalui APBN menjadi tidak dapat ditelusuri. Hal inilah yang membuat peruntukkan dana BK menjadi tidak jelas.

Beberapa pihak menginginkan agar dana yang berasal dari BK dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia. DMSI mengusulkan agar dana BK digunakan untuk dana riset (Responden 2, Wawancara Personal, 17 November 2014). Tidak hanya pengusaha, petani juga mengajukan usul terkait dengan pemanfaatan dana BK untuk pengembangan industri kelapa sawit dari sisi petani. Hal ini seperti yang disampaikan oleh APKASINDO. APKASINDO menginginkan agar dana BK digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan pedesaan, peremajaan tanaman kelapa sawit, penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani, pengadaan bibit unggul, dan sertifikasi kebun petani⁵².

Menanggapi usulan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan pemanfaatan dana BK maka pemerintah melalui Kemenkeu menjadikan Pasal 2A ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai landasan tentang tujuan pengenaan BK. Dilandaskan pada UU tersebut maka tujuan pengenaan BK adalah untuk melindungi kepentingan nasional seperti menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas tertentu, dan menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Perihal di luar yang telah disebutkan di atas, termasuk pemanfaatan BK untuk kegiatan tertentu tidak diatur dalam Undang-Undang ini (Kementerian Perdagangan, Teks Hasil Wawancara Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan untuk Majalah InfoSawit dengan Tema BK CPO dan Produk Turunannya, 31 Desember 2014). Sebagai alternatif, Pemerintah Daerah (Pemda) membutuhkan pendanaan untuk kegiatan tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari dana APBD adalah Pemda yang bersangkutan dapat mengusulkan tambahan alokasi dana kepada kementerian terkait melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan (Kementerian Perdagangan, Teks Hasil Wawancara Direktur Ekspor Produk Pertanian dan

⁵² (Kementerian Pertanian, <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tanhun/halkomentar-212-pertemuan-koordinasi-asosiasi-petani-kelapa-sawit-indonesia-apkasindo-tahun-2.html>, ak-ses 10 Maret 2015)

Kehutanan Kementerian Perdagangan untuk Majalah InfoSawit dengan Tema BK CPO dan Produk Turunannya, 31 Desember 2014).

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana khusus bagi pengembangan hilirisasi kecuali jika ada kementerian terkait yang mengusulkan dan memiliki tambahan alokasi dana untuk mendukung pengembangan hilirisasi. Jika kementerian terkait harus mengajukan terlebih dahulu tambahan alokasi dana untuk mengembangkan hilirisasi maka keinginan pengusaha untuk memperoleh dana riset juga masih belum dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan dana untuk riset yang tidak sesuai dengan tujuan pengenaan BK. Selain itu, pengusaha juga bukan merupakan bagian dari pemerintah sehingga tidak dapat mengusulkan tambahan alokasi dana untuk riset kepada kementerian terkait.

Usulan yang diajukan oleh banyak pihak terkait dengan pemanfaatan dana BK belum dapat diwujudkan secara optimal. Pemerintah hanya memberikan solusi atas pengajuan dana oleh Pemda melalui Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan kepada kementerian terkait, tapi tidak dengan pelaku industri. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengakomodasi pemanfaatan dana BK bagi pelaku industri inilah yang menyebabkan perkembangan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia belum optimal.

Apabila pemerintah ingin mengakomodasi keinginan pihak – pihak yang ada terkait dengan pemanfaatan dana BK maka Undang – Undang yang ada harus diubah. Sedangkan mengubah Undang-Undang bukan merupakan hal yang mudah (Responden 7, Wawancara Personal dengan Kemendag, 31 Desember 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru menjadi penghalang bagi perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Dilandaskan pada hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mampu berperan sebagai *manager of conflicts* terkait dengan pemanfaatan dana BK yang jelas diperlukan oleh pelaku industri bagi pengembangan industri kelapa sawit.

Penutup

Dari penjelasan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa faktor domestik yang menyebabkan perkembangan hilirisasi kelapa sawit Indonesia belum optimal adalah ketidakmampuan negara berperan sebagai *entrepreneur* dan *manager of conflicts*. Ketidakmampuan negara berperan sebagai *entrepreneur* terlihat dari ketidakjelasan visi industri kelapa sawit karena tidak memiliki *blueprint*.

Selain ketidakjelasan visi industri kelapa sawit, ketidakmampuan negara berperan sebagai *entrepreneur* juga terlihat dari ketidaksinergian pemerintah dengan pelaku industri kelapa sawit. Pemerintah menggunakan Bea Keluar sebagai instrumen hilirisasi. Sedangkan pelaku industri kelapa sawit menginginkan instrumen hilirisasi melalui pemberian insentif dan inovasi. Di samping kedua hal tersebut, ketidaksinergian pemerintah dalam formulasi Bea Keluar dari sisi negara sebagai *entrepreneur* juga merupakan faktor penyebab bagi perkembangan hilirisasi kelapa sawit yang belum optimal. Penyebabnya adalah adanya kepentingan yang dimiliki oleh masing – masing institusi selama dalam proses formulasi Bea Keluar.

Ketidakmampuan negara berperan sebagai *manager of conflicts* terlihat dari belum adanya solusi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kerugian yang diperoleh petani akibat perilaku pengusaha industri hilir yang membeli Tandan Buah Segar di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu, ketidakmampuan negara berperan sebagai *manager of conflicts* juga terlihat dari belum optimalnya solusi yang diberikan atas ketidakjelasan pemanfaatan dana Bea Keluar oleh pemerintah. Ketidakjelasan pemanfaatan dana Bea Keluar oleh pemerintah dapat terjadi karena pendapatan dari Bea Keluar dijadikan satu dengan pendapatan lainnya yang diperoleh pemerintah dan digunakan untuk APBN. Sedangkan Bea Keluar perlu dimanfaatkan oleh pelaku industri baik hulu maupun hilir untuk mengembangkan industri kelapa sawit. Pemerintah hanya memberikan solusi atas pengajuan dana oleh Pemda melalui Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan kepada kementerian terkait, tapi tidak dengan pelaku industri.

REFERENSI

Buku dan Majalah

- Chang, Hha-Joon. 2003. *Globalization, Economic Development, and The Role of State*. London: Zed Book Ltd.
- Covey, Stephen R. 1989. *The 7 Habits of Highly Effective People*. New York: Free Press.
- Degnbol-Martinussen, John. 2001. *Policies, Institutions, and Industrial Development*. New Delhi: Sage.
- InfoSAWIT, Majalah. 2014. *Mimpi Produk Hilir*. Edisi November.
- Pahan, Iyung. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Bisnis dari Hulu hingga Hilir*. Depok: Penebar Swadaya.
- Palm Oil Agribusiness Strategy Policy Institute (PASPI). 2014. *The Sustainability of Indonesian Palm Oil Industry*. Bogor: PASPI.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- UNCTAD. 2013. *Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries*. Geneva: United Nations Publications.

Tesis

- Asri, Silsila. 2011. *Peran Pemerintah dalam Industrialisasi: Studi Kasus Upgrading Industri Kelapa Sawit Malaysia*. Tesis Mahasiswa Strata-2 Universitas Gadjah Mada.
- Berlian, Gris Sintya. 2015. *Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia*. Tesis Mahasiswa Strata-2 Universitas Gadjah Mada.

Artikel dan Jurnal

- Armstrong, J. Scott dan Kesten C. Green. 2005. *Competitor-oriented Objectives: The Myth of Market Share*. <http://www.buseco.monash.edu.au/ebs/pubs/wpapers/2005/wp17-05.pdf> [diakses 26 November 2014].
- Nassir Amirrudin, Mohd. 2005. *Market Potential and Challenges for The Malaysian Palm Oil Industry in Facing Competition from Other Vegetable Oils*. http://www.researchgate.net/publication/242578313_Market_Potential_and_Challenges_for_the_Malaysian_Palm_Oil_Industry_in_Facing_Competition_from_Other_Vegetable_Oils [diakses 6 Feb- ruari 2015].
- Rasiah, Raja dan Azmi Shahrin. *Development of Palm Oil and Related Products in Malaysia and Indonesia*. 2006. http://www.researchgate.net/profile/Rajah_Rasiah/publication/237474157_Development_of_Palm_Oil_and_Related_Products_in

Malaysia_and_Indonesia/links/02e7e52670ab3124ca000000 [diakses 28 Agustus 2014].

Sutopo, W. *et al.* 2014. *Evaluation of Valuable Chain in Palm Oil Industry Based on Scor Model: A Case Study*.
http://ormawa.ft.uns.ac.id/repo/data/6/SCM/Kuliah%20SCM/Paper%20PIC%203%20SCM%20for%20Palm%20Oil/Paper%20PIC%203%20SCM%20for%20Palm%20Oil/IJLSM_Fnl_REV_1_04_02_14.pdf [diakses 4 Septem- ber 2014].

Dokumen Pemerintah

BKPM. *Laporan Final Sawit, Karet, dan Kakao*.

Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. 2014. *Kebijakan Hilirisasi Perkebunan (power point)*.

Kementerian Perdagangan. Hasil wawancara Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan untuk Majalah InfoSawit dengan Tema *BK CPO dan Produk Turunannya*.

_____. *Kebijakan Bea Keluar (BK) terhadap Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan*.

_____. *Laporan Tentang Realisasi Ekspor dan Produk Turunannya per Negara Tujuan Ekspor Periode 2009-2014 (Periode Januari-September)*.

Kementerian Perindustrian. 2009. *Roadmap Industri Pengolahan CPO*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Laporan Critical Analysis Kebijakan Kelapa Sawit*.

Setiawan, Hari Poerna. 2014. *Kebijakan Bea Keluar dan Produk Turunannya: Kronologis Penyusunan dan Penyempurnaan dalam Rangka Hilirisasi Industri Sawit (power point)*.

Susanto, Ir.Panggah M.M. 2014. *Kebijakan Nasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit sebagai Inisiatif Kebijakan Penumbuhan Ekonomi Produktif Melalui Peningkatan Daya Saing Industri (power point)* disampaikan dalam acara *International Conference and Exhibition of Palm Oil (ICE IPO)*.

Internet

Sinaga, Sahat. 2014. *Direktur Eksekutif GIMNI: Harga Sawit Setara Soft Oil, Kampanye Negatif Hilang*. <http://www.agrofarm.co.id/m/sawit/940/sahat-sinaga-direkturekse-kutif-gimniharga-sawit-setara-soft-oil-kampanyenegatif-hilang/#.VIpKzDGUfcA> [diakses 12 Desember 2014].

Wicaksono, Kurniawan Agung. 2014. *Perlambatan Ekonomi: Jokowi Harus Pilih Industri Prioritas*. <http://industri.bisnis.com/read/20141107/257/271106/perlambatanecono-mijokowi-harus-pilihindustri-prioritas> [diakses 12 Januari 2015].

Anon. 1999. *Non-tariff Barriers and New Protectionism*. <http://www.swlearning.com/economics/yarbrough/yarbrough5e/pdf/Chap07.pdf> [diakses 18 November 2014].

Anwar, Khairul. 2012. *Sinergi dan Strategi Kebijakan Lintas Kementerian: Kasus Perkebunan Kelapa Sawit K2-I di Riau, 2012*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32269&val=2289> [diakses 11 November 2014].

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 2014. *Pertumbuhan Areal Kelapa Sawit Meningkat*. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-362-pertumbuhan-areal-kelapa-sawit-meningkat.html> [diakses 30 Oktober 2014].

Oegroseno, Mr. Arif Havas. 2014. *European Palm Oil Conference 2014: Nutrition and Sustainability Challenges*. <http://www.palmoilandfood.eu/sites/default/files/Pointers%20DBRIEPOC%202014revDB.pdf> [diakses 29 Januari 2015].

Kayne, Jay. 1999. *State Entrepreneurship Policies and Programmes*. http://www.energizingentrepreneurs.org/file_download/4eeb4897-b78e-4cc59da63c8ffc633d26 [diakses 15 November 2014].

Kementerian Keuangan. 2013. *Kajian Signifikansi Bea Keluar terhadap Hilirisasi Industri Sawit*. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013kajian_pkpn_Kajian%20Signifikansi%20Bea%20Keluar%20thd%20Hilirisasi.pdf [diakses 9 Juni 2014].

Kementerian Perindustrian. *n.d. Kebijakan Industri Nasional*. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19/Kebijakan-Industri-Nasional> [diakses 24 Januari 2015].

_____, *n.d. Lamban, Hilirisasi CPO Indonesia*. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3701/Lamban,-Hilirisasi-CPO-di-Indonesia> [diakses 12 Juni 2014].

_____. *n.d. Perkembangan Ekspor Indonesia Berdasarkan Sektor*. <http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1> [diakses 2 Oktober 2014].

- Kompas. 2014. *Pengusaha Biodiesel Dukung Pemerintah Laporkan UE ke WTO*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/02/2101548/Pengusaha.Biodiesel.Dukung.Pemerintah.Laporkan.UE.ke.WTO>. (diakses 2 Februari 2014).
- Kusmartata, Djaka dan Hari Poerna Setiawan. *n.d. Bea Keluar Sawit: Antara Kepentingan Ekonomi dan Nasionalisme*. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Bea%20Keluar%20Sawit%20Antara%20Kepentingan%20Ekonomi%20dan%20Nasionalisme.pdf> [diakses 26 Januari 2015].
- Liputan 6 SCTV. 2013. *RI Lawan Tuduhan Anti-Dumping Biodiesel dari Uni Eropa*. <https://bisnis.liputan6.com/read/760768/ri-lawan-tuduhan-anti-dumpingbiodieselda-riuni-eropa> [diakses 2 Februari 2015].
- Malaysian Palm Oil Board. *n.d. Vision*. <http://www.mpob.gov.my/en/about-us/vision-a-mission> [diakses 9 Januari 2015].
- Media Perkebunan. 2014. *PASPI Organisasi Baru Kelapa Sawit*. http://media.perkebunan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=639:paspi-organisasi-barukelapasawit&catid=2:komoditi&Itemid=26 [diakses 3 September 2014].
- Riset Perkebunan Nusantara. *n.d. Sebagian Hasil Dana BK CPO untuk Riset*, <http://rpn.co.id/site/homes/artikel/111/Sebagian-Dana-Hasil-BK-CPO-untuk-Riset> [diakses 21 Januari 2015].
- Sawit Indonesia, 2015. *Di Mana Peran dan Keberpihakan Pemerintah Terhadap Sawit*, <http://sawitindonesia.com/sajian-utama/dimana-peran-dan-keberpihakanpemerintah-terhadap-sawit> [diakses 9 Maret 2015].
- Sime Darby. 2009. *Palm Oil Industry in Malaysia*. http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1121703274255/14392641242337549970/Malaysian_Palm_Oil_Industry.pdf [diakses 28 Desember 2014].
- Sipayung, Tungkot. 2014. *Menyikapi Tuduhan Dumping Biodiesel*. <http://infobioenergy.blogspot.com/2014/01/menyikapi-tuduhan-dumping-biodiesel.html> [diakses 2 Februari 2015].
- Wibisono, B Kuntoro. 2013. *Dampak Kebijakan Baru Biofuel Uni Eropa bagi Indonesia*. <http://www.antaranews.com/berita/395426/dampakkebijaksanaan-baru-biofuel-uni-eropa-bagi-indonesia> [diakses 25 Januari 2015].
- Widyasari, Esti. 2014. *Hilirisasi Kelapa Sawit Kokohkan Indonesia*. http://www.tambang.co.id/detail_berita.php?category=18&newsnr=8865 [diakses 3 September 20- 14].

Undang - Undang

Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.011/2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011.

Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/OT.140/2/2010.

Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2011.

Peraturan Presiden No.28 tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.